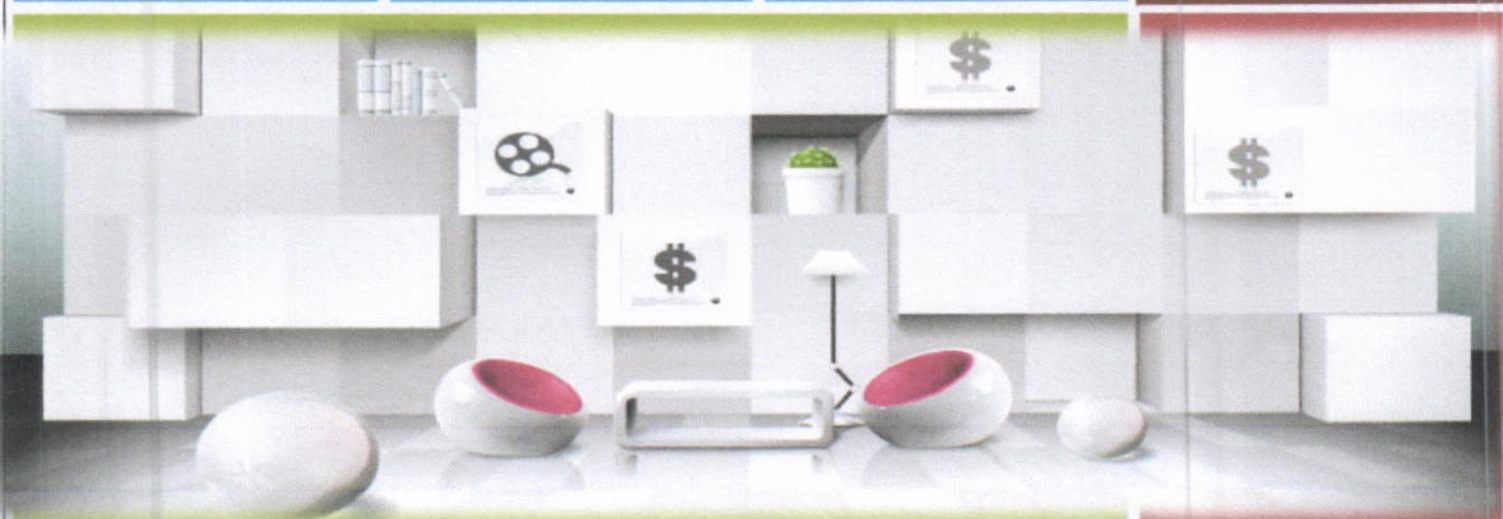




**DESIGN PENYELENGGARANAN
SISTEM PENGENDALIAN INSTANSI PEMERINTAH (SPIP)
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayahNya, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan resiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktek tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kepala
Dinas Koperasi, UMKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. AZRAL

Nip. 19621231 198602 1 039

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	1
	B. Dasar Hukum
	2
	C. Maksud dan Tujuan
	2
	Ruang Lingkup
	3
BAB II	Sekilas Tentang SPIP
	4
	A. Pengertian
	4
	B. Tujuan SPIP
	4
	C. Unsur-unsur SPIP
	5
	D. Pernyataan Tanggung Jawab (<i>Statement of Responsibilities</i>)..
	7
BAB III	Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
	9
	A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik
	9
	B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
	9
	C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
	11
BAB IV	Risiko dan Kegiatan Pengendalian
	14
	A. Pernyataan Tujuan
	14
	B. Risiko-risiko
	14
	C. Pengendalian Terpasang
	16
	D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
	18
BAB V	Informasi dan Komunikasi
	20
BAB VI	Pemantauan dan Evaluasi..
	22
BAB VII	Penutup
	24
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, tugas pokok yang diemban oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan adalah perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang system pengendalian intern yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di

lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/56/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan

dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas

penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

BAB III

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan ; Seluruh lingkup Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan (1 Sekretariat dan 3 bidang) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Tidak Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya	Cukup Memadai

	Manusia	
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.

II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD serta adanya pemeriksaan rutin

BAB IV

RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan , dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya koperasi berkualitas dan UMK Tangguh;
2. Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan , terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

1. Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah
2. Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bimtek, tidak semua peserta menerapkan hasil bimtek tersebut
3. Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasikannya informasi permodalan bagi UMKM
4. Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor
5. Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang

perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah

6. Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan pengurus koperasi,

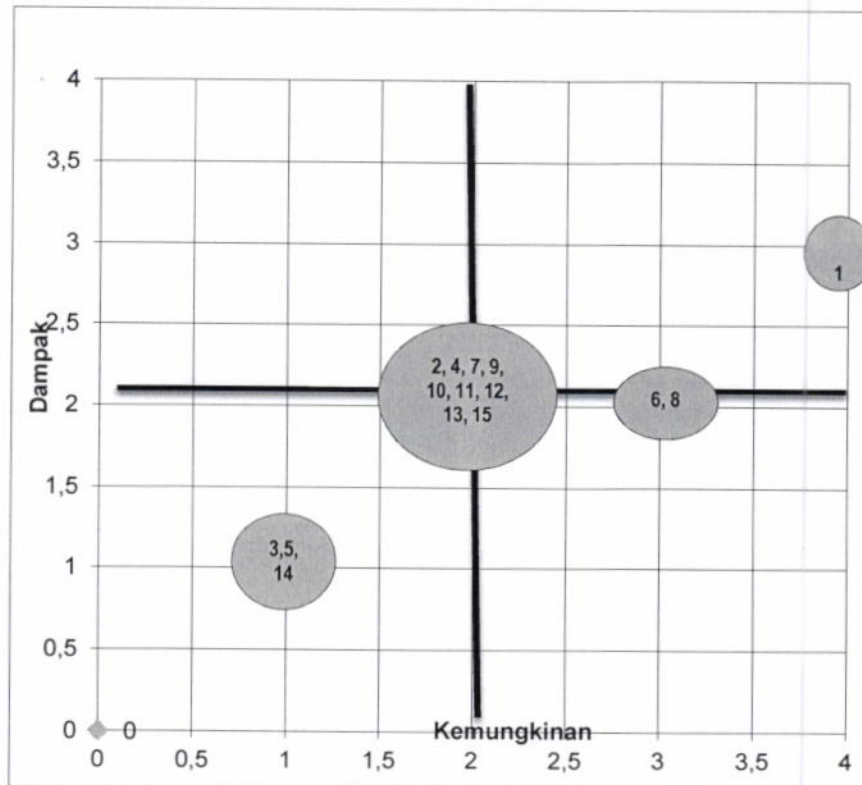
Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- 1 Meningkatkan mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium
- 2 Meningkatkan omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.
- 3 Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.
- 4 Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan
- 5 Memperkuat sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

- 1 Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya
- 2 Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid
- 3 Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar
- 4 Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan
- 5 Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat
- 6 Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrolagian
- 7 Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas koperasi, UMKM, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- 1 Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta sosialisasi
- 2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi
 - Melaksanakan bimtek dan sosialisasi tentang Peraturan Pengawasan Koperasi, Bimtek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, melakukan pengawasan koperasi.

- 3 Kegiatan Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
 - Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti temu mitra dan sosialisasi, serta kriteria calon debitur KUR
 - Dibuatkan format isian data yang harus dilengkapi UMKM
- 4 Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - Identifikasinya UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi
- 5 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)
 - Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti pelatihan.
- 6 Kegiatan Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
 - Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan
- 7 Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri
 - Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan
- 8 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah
 - Diagnosa dan analisa permasalahan IKM
 - Melakukan pendataan langsung lapangan
- 9 Kegiatan Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan
 - Telah terbentuknya beberapa kelompok Industri dan sentra yang sudah berlegalitas
- 10 Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Pemantauan berkala
 - Pendataan IKM yang difasilitasi informasi kemitraan melalui temu usaha, IKM yang difasilitasi kemitraan dan IKM yang bermitra
- 11 Kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Pasar
 - Dilakukan pengawasan terhadap pengelola pasar
- 12 Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI
- 13 Kegiatan Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI
- 14 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
 - Melakukan pengawasan barang beredar setiap bulannya,
- 15 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah
 - Melengkapi peralatan operasional kebutuhan Terra Ulang
- 16 Kegiatan Pemantauan Harga dan Operasi Pasar
 - Melakukan pembinaan kepada pedagang yang menaikkan harga diatas

D. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang sbb:

- 1 Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - Surat pernyataan bahwa peserta sesuai dengan kriteria yang diminta
- 2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi
 - Penambahan personil pembina koperasi yang cakap, ulet dan memahami laporan keuangan
- 3 Kegiatan Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
 - Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM
 - Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdise tiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan
- 4 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan
- 5 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)
 - Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM dan pengurus koperasi
- 6 Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
 - Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk
- 7 Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan Klaster Industri
 - Pengembangan klaster Industri kerajinan unggulan
- 8 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah
 - Pengembangan IKM potensial melalui fasilitasi pemasaran dan standarisasi proses produksi (peningkatan kualitas melalui perbaikan cara berproduksi yang baik)
 - Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)
- 9 Kegiatan Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan
 - Fasilitasi kegiatan Penataan dan Penumbuhan kelompok IKM/ sentra melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait, di tingkat kecamatan maupun nagari
- 10 Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

- Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan
- 'Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)
- 11 Kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Pasar
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
- 12 Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
- 13 Kegiatan Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
- 14 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang da Jasa
 - Meningkatkan pengawasan dan mengikut sertakan ASN yang memiliki sertifikat PPNS
- 15 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
 - Melengkapi peralatan operasional dan peningkatan SDM
- 16 Kegiatan Pemantauan Harga dan Operasi Pasar
 - Melakukan pemantauan dan monitoring harga

BAB V

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Koperasi,UMKM, Perdagangan dan Perindustrian terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- 1 Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
 - Surat
- 2 Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi
 - surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 3 Kegiatan Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
 - 'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 4 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
 - 'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 5 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)
 - ' kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 6 Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
 - 'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 7 Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan Klaster Industri
 - 'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 8 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah
 - 'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 9 Kegiatan Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan
 - 'surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya
- 10 Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
 - Menghubungi dan memantau langsung ke lokasi
 - melakukan pendataan Langsung

- 11 Kegiatan Pengamanan dan Pengelolaan Pasar
 - Karcis (barang kuasi), kwitansi/ pembayaran
- 12 Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Pemantauan langsung
- 13 Kegiatan Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 - Koordinasi dan mengajukan usulan melalui KUA/PPAS.
- 14 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang da Jasa
 - Surat Edaran Kebutuhan barang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan
- 15 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
 - Sosialisasi kepada pedagang tentang Terra Ulang
- 16 Kegiatan Pemantauan Harga dan Operasi Pasar
 - Papan Informasi Harga, Sosialisasi, Media Sosial

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, dan Berkualitas						
No	Misi	Tujuan	Sasaran		Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran	
1	2	3	4		5	
1	Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	Terwujudnya koperasi Berkualitas dan UMK Tangguh	1	Meningkatnya Kinerja Koperasi	1	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
					2	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi
			2	Meningkatkan Skala Usaha Usaha Mikro Kecil	1	Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
					2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
					3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)
			Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian daerah	1	Meningkatnya omset IKM	1
		2				Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan Klaster Industri
		3				Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah
		2				Meningkatnya penyerapan tenaga kerja IKM
		2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap Perekonomian Daerah	1.	Meningkatnya omset perdagangan
2	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar					
3	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan					
4	Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan					
2	kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya				1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang da Jasa
					2	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah
					3	Pemantauan Harga dan Operasi Pasar

IDENTIFIKASI RISIKO

SKPD : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kegiatan	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilih Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.	Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah	Kasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Ketika adanya pemilihan pengurus koperasi, masalah pendidikan sering diabaikan	Tidak semua materi bisa dipahami dengan cepat dan maksimal oleh Peserta sehingga masih rendahnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai prinsip prinsip perkoperasian
2.	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan pengawas terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian	Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bimtek, tidak semua peserta menerapkan hasil bimtek tersebut	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Ilmu yang didapatkan sering tidak diterapkan pada koperasi	Kemampuan SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola masih rendah, sehingga belum mampu untuk menyusun SOP, SOM, ART, Persus.
		Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Belum adanya sosialisasi Permenkop no. 9 tahun 2018 tentang pembinaan dan penyelenggaraan koperasi	Rendahnya kesadaran pengurus dalam peningkatan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi
3	Menfasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha mikro kecil dan menengah	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasinya informasi permodalan bagi UMKm	Rendahnya motivasi UMKM untuk mengikuti temu mitra dan sosialisasi. Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam memberikan informasi usahanya sehingga datanya tidak memenuhi syarat untuk diinput keaplikasi SIKP-KUR	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM menganggap temu mitra dan sosialisasi tidak berdampak dan mendatangkan manfaat secara langsung bagi mereka	Tujuan kurang tercapai
		Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor	Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pelaku UMKM beranggapan kalau hal ini akan berhubungan dengan perpajakan	Validasi data belum sepenuhnya akurat
4	Facilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Setelah dilakukan bimtek/pelatihan, tidak semua peserta menerapkan hasil bimtek tersebut	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kurangnya motivasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha (meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk) dan rendahnya kesadaran dan kemauan pengurus koperasi dalam mengembangkan koperasi	kurang berkembangnya dan dikenalnya produk unggulan daerah

1	2	3	4	5	6	7
5	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan pengurus koperasi,	Rendahnya produktifitas, nilai tambah dan rendahnya kualitas produk sehingga produk unggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kurang dikenal di tingkat nasional maupun internasional	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kurangnya motivasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha (meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk)	kurang berkembangnya dan dikenalnya produk unggulan daerah
6	Facilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham	Pelaku usaha dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	Legalisasi dan sertifikasi produk IKM jadi tidak efektif dalam meningkatkan mutu produk
7	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan Klaster Industri	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan ditingkat nasional maupun internasional.	- Pelaku usaha dan Kasi pengembangan teknologi industri	- Teknologi / peralatan yang digunakan belum optimal	Omset IKM dan skala usaha tidak meningkat melalui promosi/ pameran dan pelatihan Dekranasda
					Produk yang kurang inovasi serta pola pikir pelaku IKM yang belum memahami pentingnya tahap promosi mengakibatkan	
					- Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	
8	Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Metode pembinaan dan pengawasan yang diberikan tidak efektif	Pelaku IKM	Kurangnya pengetahuan pelaku IKM mengenai standar produksi dan kualitas produk yang baik dan bernilai tinggi	Kualitas IKM, pelaku IKM serta produk IKM tidak meningkat
		Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat	Kasi Pengendalian dan pengawasan industri	- IKM tumbuh sendiri dan kurangnya koordinasi dengan dinas	Tidak tersedianya Data Base IKM yang akurat
9	Penumbuhan dan Penataan Sentra Sentra Industri Unggulan	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	Sentra tidak bertahan lama dan penyelenggaraan sentra nantinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pelaku IKM dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kelompok IKM belum terorganisir dengan baik	Stag-nya pertumbuhan kelompok dan sentra IKM unggulan serta tidak tertatanya dengan baik kelompok dan sentra IKM yang sudah ada
					Lokasi beberapa IKM unggulan dan berpotensi yang menyebar serta belum berbentuk kelompok	

1	2	3	4	5	6	7
10	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang enggan memberikan data stok barang kebutuhan bahan pokok	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	pedagang menganggap dengan dilakukan pendataan berdampak negatif terhadap mereka	Tidak optimalnya data ketersediaan kebutuhan bahan pokok
		Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Tidak maksimalnya data yang dikumpulkan	Kasi Bina Pasar	kurangnya SDM untuk melakukan pendataan	Tidak tercapainya target dalam pendataan kondisi pasar
11	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	tidak jalannya fungsi pengelola pasar	Kasi Bina Pasar	Rendahnya kompensasi/gaji pengelola pasar	Tidak optimalnya pengelolaan pasar
12	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Pemda, Kadis dan PPTK	Terbatasnya anggaran untuk melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Tidak tercapainya sasaran strategis dinas dalam menciptakan pasar rakyat
13	Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Kasi Bina Pasar	Terbatasnya anggaran untuk melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Tertundanya atau terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan dimulainya pekerjaan
14	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Tidak terpenuhinya jumlah kebutuhan barang oleh distributor / penyalur sehingga harga yang dijual sesuai dengan HET	Kasi Perlindungan Konsumen	Kurangnya kontrol Distributor atau penyalur terhadap kios pengencer	Tidak meratanya harga yang dibayar oleh masyarakat
15	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrolgian	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Kasi Perlindungan Konsumen	Masih kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan operasional Terra Ulang	Tidak tercapainya target operasi pelaksanaan operasional terra ulang pada tahun 2017
16	Pemantauan Harga dan Operasi Pasar	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Tidak samanya harga jual oleh Pedagang dengan alasan harga pokok pembelian dan ongkos angkut	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Asal dan tempat pembelian barang serta kualitas yang berbeda	Tidak diperolehnya harga tunggal untuk masing-masing jenis barang

Identifikasi Kegiatan & Tujuan Kegiatan

No	Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Keselaran dengan tujuan/sasaran strategis	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.	selaras dengan renstra	
2	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Meningkatnya kepatuhan Pengurus dan pengawas terhadap Peraturan Perundang-undangan Perkoperasian	selaras dengan renstra	
		Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	selaras dengan renstra	
3	Menfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasinya informasi permodalan bagi UMKm	selaras dengan renstra	
		Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor		
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	selaras dengan renstra	
5	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (DAK)	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan pengurus koperasi,	selaras dengan renstra	

1	2	3	4	5
6	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	selaras dengan renstra	
7	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Meperkuat Jaringan Klaster Industri	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	selaras dengan renstra	
8	Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	selaras dengan renstra	
		Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	selaras dengan renstra	
9	Penumbuhan dan Penataan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	selaras dengan renstra	

1	2	3	4	5
10	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya		
		Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid		
11	Pengamanan dan Pengelolaan Pasar	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar		
12	Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	selaras dengan renstra	
13	Peningkatan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	selaras dengan renstra	
14	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	selaras dengan renstra	
15	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar melalui Mantari Pasar	selaras dengan renstra	
16	Pemantauan Harga dan Operasi Pasar	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	selaras dengan renstra	

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan atas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)

ANALISIS RISIKO

SKPD: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (Tks)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.	Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah	Kasi Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Ketika adanya pemilihan pengurus koperasi, masalah pendidikan sering diabaikan	peserta belum memahami materi yang disampaikan narasumber sehingga koperasi-koperasi belum bisa menyajikan laporan keuangan yang baik	3	4	12
2	Meningkatkan pembinaan, dan pengawasan koperasi serta memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi	Setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan bimtek, tidak semua peserta menerapkan hasil bimtek tersebut	Kasi Permodalan, Pengawasan, Permodalan dan Perlindungan Koperasi	Tingkat pendidikan pengurus rata-rata dibawah SLTA	Kemampuan SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola masih rendah, sehingga belum mampu untuk menyusun SOP, SOM, ART, Persus.	2	2	4
		Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi	Belum adanya sosialisasi Permenkop no. 9 tahun 2018 tentang pembinaan dan penyelenggaraan koperasi	Kemampuan SDM Pengurus/Pengawas/Pengelola masih rendah, sehingga belum mampu untuk menyusun SOP, SOM, ART, Persus.	3	3	9
3	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasikannya informasi permodalan bagi UMKm	Sebagian pelaku UMKM yang di kirim mengikutiPelatihan tidak sesuai dengan pelaku UMKM yang sudah didata / diidentifikasi sehingga tidak tercapainya sasaran dalam meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM dalam pengembangan usaha.	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	sebahagian UMKM tidak termotifasi karena tidak mendatangkan manfaat secara langsung	Tidak tercapainya tujuan secara maksimal	1	1	1
	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor	Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah		Pelaku UMKM beranggapan kalau hal ini akan berhubungan dengan perpajakan	Validasi data belum sepenuhnya akurat	2	2	4

4	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Rendahnya produktifitas, nilai tambah dan rendahnya kualitas produk sehingga produk unggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kurang dikenal di tingkat nasional maupun Internasional	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kurangnya motivasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha (meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk)	kurang berkembangnya dan dikenalnya produk unggulan daerah	2	2	4
5	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan pengurus koperasi,	Rendahnya motivasi UMKM dan pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan.	Kasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM dan pengurus koperasi menganggap pelatihan tidak berdampak dan mendatangkan manfaat secara langsung bagi mereka	Tujuan kurang tercapai	1	1	1
6	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham	Pelaku usaha dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	Legalisasi dan sertifikasi produk IKM jadi tidak efektif dalam meningkatkan mutu produk	3	2	6
7	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan.	IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan ditingkat nasional maupun internasional.	Pelaku usaha dan Kasi pengembangan teknologi industri	Teknologi / peralatan yang digunakan belum optimal Produk yang kurang inovasi serta pola pikir pelaku IKM yang belum memahami pentingnya tahap promosi mengakibatkan kurang optimalnya bantuan promosi yang diberikan - Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan terhadap pelaku usaha	Omset IKM dan skala usaha tidak meningkat melalui promosi/ pameran dan pelatihan Dekranasda	2	2	4

8	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif	Metode pembinaan dan pengawasan yang diberikan tidak efektif bagi IKM di kab. Pesisir Selatan	Pelaku IKM	Kurangnya pengetahuan pelaku IKM mengenai standar produksi dan kualitas produk yang baik dan bernilai tinggi	Kualitas IKM, pelaku IKM serta produk IKM tidak meningkat	2	3	6
			Kasi Pengendalian dan pengawasan industri	Kurangnya personil yang terampil mengakibatkan kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan				
	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat	Kasi Pengendalian dan pengawasan industri	- IKM tumbuh sendiri dan kurangnya koordinasi dengan dinas	Tidak tersedianya Data Base IKM yang akurat	3	2	6
		Tidak terdapatnya seluruh IKM yang ada		- Lokasi IKM tersebar				
9	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	Sentra tidak bertahan lama dan penyelenggaraan sentra nantinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pelaku IKM dan Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	Kelompok IKM belum terorganisir dengan baik Lokasi beberapa IKM unggulan dan berpotensi yang menyebar serta belum berbentuk kelompok	Stag-nya pertumbuhan kelompok dan sentra IKM unggulan serta tidak tertatanya dengan baik kelompok dan sentra IKM yang sudah ada	2	2	4
10	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang enggan memberikan data stok barang kebutuhan bahan pokok	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	pedagang menganggap dengan dilakukan pendataan berdampak negatif terhadap mereka	Tidak optimalnya data ketersediaan kebutuhan bahan pokok	2	2	4
	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Tidak maksimalnya data yang dikumpulkan	Kasi Bina Pasar	kurangnya SDM untuk melakukan pendataan	Tidak tercapainya target dalam pendataan kondisi pasar	2	3	6
11	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	Perlunya kejujuran dan aktivitas Mantari Pasar dalam melakukan penagihan retribusi petak / kios dan pelataran terhadap pedagang	Kasi Bina Pasar	Adanya tempat yang tidak memadai (rusak), keamanan dan kebersihan pasar	Tidak tercapainya target PAD sebagaimana yang telah ditetapkan	2	2	4
		tidak jalannya fungsi pengelola pasar	Kasi Bina Pasar	Rendahnya kompensasi/gaji pengelola pasar	Tidak optimalnya pengelolaan pasar	2	2	4
12	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Kasi Bina Pasar	Terbatasnya anggaran untuk melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Tidak tercapainya sasaran strategis dinas dalam menciptakan pasar rakyat	2	2	4
13	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Kasi Bina Pasar	Terbatasnya anggaran untuk melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Tidak tercapainya sasaran strategis dinas dalam menciptakan pasar rakyat	2	2	4
14	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Pedagang merasa kurang senang ketika tim melakukan pengawasan barang beredar	Kasi Perlindungan Konsumen	pedagang menganggap dengan dilakukan pendataan berdampak negatif terhadap mereka	Tidak optimalnya data barang barang yang tidak layak edar	1	1	1
15	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrolgian	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Kasi Perlindungan Konsumen	Masih kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan operasional Terra Ulang	Tidak tercapainya target operasi pelaksanaan operasional terra ulang pada tahun 2017	2	2	4

16	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Tidak samanya harga jual oleh Pedagang dengan alasan harga pokok pembelian dan ongkos angkut	Kosel Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Asal dan tempat pembelian barang serta kualitas yang berbeda	Tidak diperolehnya harga tunggal untuk masing-masing jenis barang	2	2	4
----	---	--	---	--	---	---	---	---

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

SKPD : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.	Tingkat pendidikan Pengurus Koperasi yang datang rendah	Harus ada aturan yang mensyaratkan bahwa pengurus koperasi berpendidikan minimal SLTA	Quesioner kepada pengurus koperasi tentang kriteria calon peserta sosialisasi	Cukup efektif	Surat pernyataan bahwa peserta sesuai dengan kriteria yang diminta	Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2020
2	Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Peraturan - peraturan tentang perkoperasian.	Setelah dilakukan pembinaan melalui pengawasan, bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap koperasi, tidak semua peserta yang menerapkan hasil dari pembinaan yang telah dilaksanakan tersebut.	Mengadakan pelatihan pemisahan neraca, sosialisasi Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dan pengawasan secara berkelanjutan serta menerapkan aturan dan sanksi	Melaksanakan bimtek dan sosialisasi tentang Peraturan Pengawasan Koperasi, Bimtek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, melakukan pengawasan koperasi.	Cukup efektif	Penambahan personil pembina koperasi yang cakap, ulet dan memahami laporan keuangan	Kepala Dinas	Tahun 2020
	Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Masih banyaknya KSP/USP-Koperasi yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Menyurati Pengurus	Cukup efektif	Monev Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Bidang Koperasi dan UMKM	Tahun 2020
3	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasikannya informasi permodalan bagi UMKM	Rendahnya motivasi UMKM untuk mengikuti temu mitra dan sosialisasi. Kurangnya minat/motivasi UMKM dalam memberikan informasi usahanya sehingga datanya tidak memenuhi syarat untuk diinput keaplikasi SIKP-KUR	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti temu mitra dan sosialisasi, serta kriteria calon debitur KUR	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti temu mitra dan sosialisasi, serta kriteria calon debitur KUR	Cukup efektif	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	Pejabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor	Sebagian UMKM tidak mau memberikan informasi tentang usahanya karena UMKM tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah	Verifikasi data	Dibuatkan format isian data yang harus dilengkapi UMKM	Cukup efektif	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdisetiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Pelaksanan Kegiatan	Januari s/d Desember 2020

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Rendahnya produktifitas, nilai tambah dan rendahnya kualitas produk sehingga produk unggulan daerah Kabupaten Pesisir Selatan kurang dikenal di tingkat nasional maupun internasional	Identifikasinya UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi	Identifikasinya UMKM pengelola Produk Unggulan Daerah yang akan dikembangkan dengan pendekatan OVOP melalui wadah koperasi	Cukup efektif	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
5	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan pengurus koperasi,	Sebagian pelaku UMKM dan pengurus koperasi yang di kirim mengikuti Pelatihan tidak sesuai dengan pelaku UMKM yang sudah didata / diidentifikasi sehingga tidak tercapainya sasaran dalam meningkatkan kapasitas SDM pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan pengurus koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti pelatihan.	Dilampirkan kriteria calon peserta yang akan mengikuti pelatihan.	Cukup efektif	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM dan pengurus koperasi	Bidang Koperasi dan UMKM	Januari s/d Desember 2020
6	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	IKM tidak konsisten menerapkan standar mutu produk dan proses produksi yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI dan Baristand maupun Kemenkumham	Pengawasan tentang standar produksi yang baik	Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan	Belum Efektif	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
7	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan	IKM tidak bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar produk kerajinan ditingkat nasional maupun internasional.	Pengukuran tingkat omset dan skala usaha sebelum dan setelah dilakukan pelatihan dan promosi	Pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan	Cukup efektif	Pengembangan kluster Industri kerajinan unggulan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
8	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Metode pembinaan dan pengawasan yang diberikan tidak efektif bagi IKM di kab. Pesisir Selatan	Adanya laporan perkembangan IKM, sebelum dan sesudah pembinaan	Diagnosa dan analisa permasalahan IKM	Cukup efektif	Pengembangan IKM potensial melalui fasilitasi pemasaran dan standarisasi proses produksi (peningkatan kualitas melalui perbaikan cara berproduksi yang baik)	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Data IKM yang tersedia tidak valid/ tidak akurat	Pendataan yang melibatkan stakeholder (Kecamatan dan Nagari setempat) dalam	Melakukan pendataan langsung kelapangan	Tidak efektif	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tidak terdatanya seluruh IKM yang ada	dan tidak terdapat dalam pendataan IKM			dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)		
9	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	Sentra tidak bertahan lama dan penyelenggaraan sentra nantinya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Efektifitas penguatan sentra dan kelompok IKM yang berpotensi sebagai sentra melalui pembinaan yang berkelanjutan	Telah terbentuknya beberapa kelompok Industri dan sentra yang sudah berlegalitas	Cukup efektif	Facilitasi kegiatan Penataan dan Penumbuhan kelompok IKM/ sentra melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait, di tingkat kecamatan maupun nagari	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
10	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Banyaknya pedagang yang enggan memberikan data stok barang kebutuhan bahan pokok	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pemantauan berkala	Cukup Efektif	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Sebagian Pedagang tidak mau memberikan informasi tentang omset perdagangannya karena pedagang tsb takut kalau hal ini ada hubungannya dengan perpajakan dan ada juga yang sebahagian menuntut utk diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah	Pendataan yang melibatkan stakeholder (Kecamatan dan Nagari setempat) dalam pendataan IKM	Melakukan pendataan langsung kelapangan	Tidak efektif	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
11	Terlaksananya Penataan dan pengelolaan pasar	tidak jalannya fungsi pengelola pasar	Dilakukan evaluasi terhadap pengelola pasar	Dilakukan pengawasan terhadap pegelola pasar	Cukup Efektif	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
12	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Cukup Efektif	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
13	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Sulitnya melengkapi sarana prasarana pasar dengan standar SNI	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Cukup Efektif	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
14	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Pedagang merasa kurang senang ketika tim melakukan pengawasan barang beredar	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap barang beredar yang dipasok oleh Distributor	Melakukan pengawasan barang beredar setiap bulannya,	Cukup Efektif	Meningkatkan pengawasan dan mengikut sertakan ASN yang memiliki sertifikat PPNS	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020

No	Tujuan yang diidentifikasi	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang Harus ada	Pengendalian yang sudah ada	Efektivitas Pengendalian yang ada	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrolagian	Tidak dapat dilaksanakannya operasi Terra Ulang bagi pedagang	Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan operasional Terra Ulang	Melengkapi peralatan operasional kebutuhan Terra Ulang	Cukup Efektif	Melengkapi peralatan operasional dan peningkatan SDM	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020
16	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Tidak samanya harga jual oleh Pedagang dengan alasan harga pokok pembelian dan ongkos angkut	Adanya penetapan harga maksimum sesuai jenis barang kebutuhan pokok	Melakukan pembinaan kepada pedagang yang menaikkan harga diatas kewajaran	Cukup Efektif	Melakukan pemantauan dan monitoring harga	Pejabat Pelaksana Kegiatan	Januari s/d Desember 2020

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SKPD : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Pengendalian Yg Direncanakan	Bentuk/ Sarana Komunikasi	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai tentang nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.	Surat pernyataan bahwa peserta sesuai dengan kriteria yang diminta	surat	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	Mei 2020
2	Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Peraturan - peraturan tentang perkoperasian.	Mengadakan pelatihan pemisahan neraca dan pengawasan secara berkelanjutan serta menerapkan aturan dan sanksi	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	April dan Juni 2020
	Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Mengadakan sosialisasi Izin usaha Simpan Pinjam Koperasi	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Pengurus Koperasi	April s/d Agustus 2020
3	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasikannya informasi permodalan bagi UMKm	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	,Januari s/d Desember 2020
	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdise tiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Koordinasi Wali Nagari, Camat dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	,Januari s/d Desember 2020
4	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	UMKM Calon Penerima Bantuan, Pihak Rekanan	,Januari s/d Desember 2020
5	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan pengurus koperasi,	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM dan pengurus koperasi	kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Bidang Koperasi dan UMKM	Masyarakat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	,Januari s/d Desember 2020

6	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM, LPOM-MUI, Baristand, Kemenkumham, Pihak Terkait	Januari s/d Desember 2020
7	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan	Pengembangan kluster Industri kerajinan unggulan	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian/ Dekranasda)	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) dan IKM	Januari s/d Desember 2020
8	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut	Pengembangan IKM potensial melalui fasilitasi pemasaran dan standarisasi proses produksi (peningkatan kualitas melalui perbaikan cara berproduksi yang baik)	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM	Januari s/d Desember 2020
	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	IKM, OPD yang membutuhkan, Perindag Provinsi, BPS, Kementerian Perindustrian	Januari s/d Desember 2020
9	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	Fasilitasi kegiatan Penataan dan Penumbuhan kelompok IKM/ sentra melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait, di tingkat kecamatan maupun nagari	surat, kunjungan langsung, pertemuan, telepon, email, whatsapp dan media sosial lainnya	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian)	OPD terkait, masyarakat pelaku IKM	Januari s/d Desember 2020
10	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Menghubungi dan memantau langsung ke lokasi	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan	Masyarakat dan Pemilik UMKM / IKM	Januari s/d Desember 2020
	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder	melakukan pendataan Langsung	Koordinasi Mantari Pasar, Wali Nagari, Camat dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	Masyarakat Pedagang dilokasi Pasar	Januari s/d Desember 2020
11	Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar melalui Mantari Pasar	Dilakukannya pengurangan petak toko / kios yang rusak atau kosong dalam target retribusi	Karcis (barang kuasi), kwitansi/ pembayaran	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pendapatan Daerah	Mantari Pasar, Kemanan Pasar, Walinagari, Camat, Badan Pendapatan Daerah	Januari s/d Desember 2020
	Terlaksananya pengelolaan dan pengamanan pasar	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan	Pemantauan langsung	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pendapatan Daerah	Mantari Pasar, Kemanan Pasar, Walinagari, Camat, Badan Pendapatan Daerah	Januari s/d Desember 2020
12	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Koordinasi dan mengajukan usulan melalui KUA/PPAS.	Dinas Koperindg, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan	Masyarakat, walinagari, Camat serta Ninik Mamak di Kecamatan bersangkutan	Januari s/d Desember 2020

13	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Koordinasi dan mengajukan usulan melalui KUA/PPAS.	Dinas Koperindg, Bappeda, dan Badan Pengelola Keuangan	Masyarakat, walinagari, Camat serta Ninik Mamak di Kecamatan hancangkutan	Januari s/d Desember 2020
14	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap barang beredar yang dipasok oleh Distributor	Surat Edaran Kebutuhan barang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan	Distributor dan Agen Penyalur	Distributor, Penyalur, pengencer dan masyarakat	Januari s/d Desember 2020
15	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrologian	Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan operasional Terra Ulang	Sosialisasi kepada pedagang tentang Terra Ulang	Distributor dan Agen Penyalur	Kepala UPTD Metrologi	Januari s/d Desember 2020
16	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Adanya penetapan harga maksimum sesuai jenis barang kebutuhan pokok	Papan Informasi Harga, Sosialisasi, Media Sosial	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab.Pesisir Selatan	Masyarakat, Instansi terkait	Januari s/d Desember 2020

DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN

Lampiran V

SKPD : Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan yang Diidentifikasi	Uraian Pengendalian	Metode Pemantauan yang ada	Informasi dan komunikasi	Pemantauan yang akan digunakan			Tindakan Korektif Yang Diperlukan
					Metode Pemantauan	Dilakukan Oleh	Waktu	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pemahaman Pengurus Koperasi mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang perkoperasian	Mengadakan Pelatihan Akuntansi berbasis Komputerisasi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	Bidang Koperasi dan UMKM	Sudah ada	Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun	
2	Meningkatkan pembinaan, dan pengawasan koperasi serta memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi	Meningkatkan pembinaan melalui pengawasan dan pelatihan-pelatihan	Pengawasan langsung ke koperasi-koperasi		Pengawasan langsung ke koperasi-koperasi	Kabid Koperasi dan UMKM, Kasi beserta staf	2 kali per koperasi per tahun	
	Meningkatkan legalitas izin usaha simpan pinjam koperasi	Mengadakan Sosialisasi Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Monitoring dan evaluasi KSP/USP yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi		Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun per koperasi	
3	Meningkatkannya kemitraan UMKM dengan swasta dan BUMN, Terinformasikan dan terfasilitasinya UMKM dalam memperoleh permodalan, Tersosialisasikannya informasi permodalan bagi UMKM	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM	Sudah ada		Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	
	Tersedianya Data Base UMKM yang valid berdasarkan jenis usaha persub sektor	Sosialisasi pendataan UMKM kepada pelaku UMKMdise tiap Nagari/Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan	Sudah ada		Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	
4	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM yang bergerak pada produk unggulan daerah, meningkatkan volume usaha dan pendapatan pelaku KUKM dibidang perdagangan dan perindustrian, meningkatkan pemasaran KUKM produk unggulan daerah	Sosialisasi pengembangan produk unggulan daerah terhadap pelaku UMKM pengelola produk unggulan disetiap Nagari/Kecamatan	Sudah ada		Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	
5	Meningkatkan kemampuan /SDM UMKM dan pengurus koperasi,	Memberikan pembinaan dan penyuluhan baik formal maupun informal serta melakukan pendekatan secara persuasif kepada Pelaku UMKM dan pengurus koperasi	Sudah ada		Pemantauan Berkelanjutan	Atasan Langsung	1 kali setahun	

6	Meningkatnya mutu produk IKM melalui sertifikasi halal dan legalisasi / paten merk serta standarisasi kandungan produk melalui uji laboratorium	Pengawasan tentang standar produksi dan produk yang baik serta pemahaman tentang pentingnya legalitas, standarisasi dan sertifikasi produk	Kolaborasi dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan Industri guna memberikan pemahaman bagaimana cara berproduksi yang baik dan sesuai standar	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui Surat, HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	satu kali setelah terbit	Pembinaan yang lebih terintegrasi dengan OPD lain yaitu Dinas Kesehatan, Kantor Pajak, dan Bidang
7	Meningkatnya omset dan skala usaha IKM Kerajinan melalui kegiatan promosi dan pameran serta Pembinaan dan Pelatihan	Pengembangan klaster industri kerajinan unggulan dengan dukungan aktif seluruh stakeholder	Pembinaan langsung dan keikutsertaan aktif dalam berbagai pelatihan baik diselenggarakan oleh Dinas Koperindag Kab. Pessel, Provinsi Sumbar maupun Kementerian Perindustrian	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	8 kali setahun	Perlu pembinaan yang berkelanjutan dan pengawasan yang terfokus terhadap keberlangsungan usaha kerajinan
8	Peningkatan kualitas industri kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya diagnosa dan analisis permasalahan IKM serta memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan – permasalahan tersebut.	Pembinaan yang berkelanjutan	Pengawasan yang berkelanjutan dan lebih fokus pada IKM potensial	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (bidang Perindustrian) melalui HP/Telp, e mail, Whatsapp	Pemantauan Berkelanjutan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	Diperlukannya upgrade pengetahuan mengenai teknik dan metode pembinaan terhadap personel
	Tersedianya Data Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder (IKM, Kecamatan dan Nagari)	Belum ada		Validasi data IKM serta verifikasi data IKM di tingkat Kecamatan	Kasi / PPTK bersangkutan	12 Bulan	Koordinasi yang lebih aktif dengan kecamatan dan nagari dalam memberikan informasi data IKM agar data tidak salah
9	Menguatkan sentra - sentra industri yang ada dan menumbuhkan kelompok industri yang sejenis dalam satu wilayah melalui bimbingan teknis manajemen industri bagi kelompok IKM	Facilitasi kegiatan Penataan dan Penumbuhan kelompok IKM/ sentra melalui keterlibatan seluruh pihak yang terkait di tingkat kecamatan maupun nagari	Pendataan dan pembinaan langsung ke IKM dan validasi data kelompok ke Wali nagari setempat	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab Pessel, Kecamatan, Nagari dan OPD lain terkait di kab. Pessel, Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat	Pemantauan yang lebih fokus melalui form perkembangan kelompok IKM untuk kemudian dipilih kelompok IKM yang berpotensi sentra dan untuk kemudian di bentuk Sentra IKM	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	Peningkatan pemahaman personel perindustrian mengenai sentra IKM, kelompok iKM, klaster, dll
10	Terlaksananya pemantauan terhadap ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan bahan kebutuhan penting lainnya	Pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan	Lansung ke Lokasi	Sudah ada	Mengikuti acara bazar / pameran	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
	Tersedianya Data Base Perdagangan yang valid	Pendanaan yang cukup dan penambahan personil dengan melibatkan seluruh stakeholder	Sudah ada		Pemantauan berkelanjutan	Atasan langsung	1 kali setahun	
11	Terlaksananya Penagihan Retribusi Pasar melalui Mantari Pasar	Dilakukannya pengurangan petak toko / kios yang rusak atau kosong dalam target retribusi	Lansung ke Lokasi Pasar	Sudah ada	Lansung ke Lokasi Pasar	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
	Terlaksananya pengelolaan dan pengamanan pasar	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap pengelola pasar (mantri, petugas kebersihan dan petugas keamanan)	Lansung mengunjugi petugas/ pengelola pasar	Sudah ada	Lansung mengunjugi petugas/ pengelola pasar	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
12	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Lansung ke Lokasi pembangunan	Sudah ada	Lansung ke Lokasi pembangunan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	

13	Meningkatkan kualitas sarana pasar dalam Kabupaten Pesisir Selatan	Melakukan perencanaan untuk melengkapi sarana prasarana agar terpenuhinya standar SNI	Lansung ke Lokasi pembangunan	Sudah ada	Lansung ke Lokasi pembangunan	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
14	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar kebutuhan masyarakat	Peningkatan kontrol pengawasan terhadap barang beredar yang dipasok oleh Distributor	Lansung mengunjungi Distributor / Penyalur	Sudah ada	Lansung mengunjungi Distributor / Penyalur	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
15	Tersedianya kelengkapan bahan untuk keperluan operasional Kemetrolagian	Dipenuhinya kelengkapan alat kebutuhan operasional Terra Ulang	Lansung ke kantor Metrologi	Sudah ada	Lansung ke kantor Metrologi	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	
16	Tersedianya data perkembangan harga kebutuhan bahan pokok	Adanya penetapan harga maksimum sesuai jenis barang kebutuhan pokok	Lansung kepada Penjual	Sudah ada	Lansung kepada Penjual	Kasi / PPTK bersangkutan	Saat Kunjungan ke lokasi	

eterangan :

1. Kolom 1 Diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 Diisi sesuai Pengendalian yang mengalami penyempurnaan
3. Kolom 3 Cukup jelas
4. Kolom 4 Diisi dengan Atasan/Tim Khusus/APIP
5. Kolom 5 Diisi dengan Pihak/Pejabat yang bertanggungjawab melakukan pemantauan
6. Kolom 6 Cukup jelas
7. Kolom 7 Tindakan yang diperlukan apabila diperlukan penyempurnaan lebih lanjut